



Pranatan Anyar



BERPOTENSI MENJADI PEMBAWA VIRUS

Usia Muda Perlu Lebih Taat Prokes

YOGYA (KR) - Kasus Covid-19 di DIY yang masih fluktuatif, menuntut semua pihak untuk berperan aktif menekan angka penambahan kasus positif. Antara lain dengan memperkuat penegakan protokol kesehatan (prokes).

“Saya mengimbau masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terutama bagi masyarakat kelompok usia muda. Sebab warga usia muda berpotensi menjadi pembawa virus dan menularinya ke kelompok rentan. Untuk itu, penegakan prokes harus dilakukan secara ketat dan disiplin,” tandas Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Yogyakarta dr Rukmono Siswihanto MKes SpOG(K), Selasa (19/1).

Rukmono mengungkapkan, meski masyarakat kelompok usia muda ada

kecenderungan memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan lansia, namun bukan berarti mereka boleh abai dalam penegakan prokes, karena bisa merugikan lingkungan sekitarnya. Mungkin saat mereka (anak muda) terinfeksi tidak menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala (OTG), akibatnya sering tidak menyadari jika terpapar Covid-19. Padahal jika sampai menulari warga di atas 60 tahun, risiko kematiannya lebih tinggi.

“Saya tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat termasuk gene-

rasi muda untuk selalu menegakkan prokes. Selain bisa melindungi diri sendiri juga lingkungan sekitar. Apabila penularan dapat ditekan, beban rumah sakit juga berkurang,” ungkapnya.

Kepala Dinkes Kulonprogo dr Sri Budi Utami menyatakan, Pemkab Kulonprogo menyiapkan penambahan ruang perawatan bagi pasien Covid-19 baik di Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 maupun RS swasta. “Kami telah mengupayakan penambahan ruang perawatan di RSUD Wates sebanyak 30 tempat tidur (TT), enam TT di antaranya untuk ICU. Kemarin kami juga mengupayakan penambahan lagi 19 TT tapi baru proses. Jadi nanti ada 49 TT di RSUD Wates untuk merawat pasien Covid-19,” katanya. **(Ria/Ira/Rul)-d**

Vaksinasi Covid-19 Dilaksanakan 4 Tahap

JAKARTA (KR) - Program vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan secara bertahap, atau tepatnya dilakukan dalam empat tahap. Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Reisa Brotoasmoro, untuk suksesnya program vaksinasi dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dan masyarakat tetap diingatkan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan hingga gilirannya divaksinasi.

“Tahap pertama, pelaksanaan Januari hingga April 2021. Dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalani profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Reisa di Jakarta, Selasa (19/1).

Pada tahap kedua, lanjut Reisa, juga pada periode yang sama, dengan sasaran petugas pelayanan publik. Yaitu anggota TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal. Kemudian perbankan, PLN, perusahaan air minum,

serta petugas lainnya yang terlibat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam waktu ini, juga termasuk usia lanjut yakni di atas usia 60 tahun,” imbuh Reisa.

Lalu, pada tahap ketiga dilaksanakan April 2021 hingga Maret 2022, dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Sedangkan tahap keempat yaitu pada periode yang sama, dengan sasaran vaksinasi masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

Dengan mengetahui jadwal dan mekanisme vaksinasi, masyarakat diminta tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Jangan sampai masyarakat terkena Covid-19 sembari menunggu jadwal vaksinasinya. **(Sim)-d**

HADAPI PANDEMI

Prajurit TNI 'Disuntik' Semangat

TEMANGGUNG (KR) - Motivator Aqua Dwipayana ‘menyuntikkan’ semangat kepada prajurit TNI di lingkungan Korem 072/Pamungkas dan ratusan dokter militer yang tengah menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akml), untuk semakin semangat berada di barisan terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Aqua Dwipayana mengatakan, ‘suntikan’ semangat pada prajurit TNI sangat diperlukan sebab mereka selama ini berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19. Mereka tidak boleh kendur sebab sangat diperlukan keterlibatannya.

“Pandemi Covid-19 belum juga selesai, sementara keterlibatan TNI terus diperlukan. TNI tidak boleh kendur. Perlu Motivasi agar tetap semangat,” kata Aqua Dwipayana, saat sharing komunikasi dan motivasi di Kodim 0706/Temanggung, Selasa (19/1).

Aqua Dwipayana mengatakan, banyak tantangan yang dihadapi prajurit, di an-

taranya ada sebagian warga yang belum percaya adanya Covid-19, abai menerapkan protokol kesehatan. Kini, ada keraguan kehalalan vaksin.

Dandim 0706/Temanggung Letkol Kurniawan Hartanto mengatakan, prajurit TNI di Kodim 0706/Temanggung menjadi punya semangat baru dalam turut serta penanganan Covid-19. “Kami kembali bersemangat. Spirit ini akan ditularkan pada yang lain sehingga pandemi segera berlalu,” tegasnya.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi mengatakan, vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Magelang dijadwalkan mulai Februari 2021 dengan prioritas tenaga kesehatan. Masyarakat diminta tidak ragu untuk divaksin Covid-19. Selain untuk kepentingan melindungi diri sendiri, vaksin juga penting untuk melindungi orang lain.

(Osy/Bag)-d

900 WARGA DIUNGSIKAN

Banjir Bandang Terjang Puncak Bogor

BOGOR (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Jabar menyatakan 900 warga berhasil dievakuasi dari peristiwa banjir bandang di Desa Tugu Selatan Kawasan Puncak Cisarua Bogor, Selasa (19/1) pagi. Ratusan korban banjir bandang itu kini mengungsi di masjid yang lokasinya tak terdampak banjir.

“Mereka terdiri 134 kepala keluarga (KK) sudah kita evakuasi,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor Budi Pranowo saat dihubungi Antara di Bogor.

Budi mengatakan, banjir bandang tersebut menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Bahkan, beberapa akses jalan di wilayah tersebut tak dapat dilalui kendaraan bermotor. Pihaknya hingga tadi malam belum dapat memastikan mengenai adanya korban jiwa atau korban hanyut terbawa aliran sungai yang meluap, karena masih dalam proses penanganan.

“Tim BPBD terdiri tim evakuasi

dan perlengkapan, tim tenda shelter logistik, serta tim P3K dengan ambulans untuk menjemput apabila ada pengungsi,” kata Budi.

Banjir bandang tersebut, disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang disertai longoran dari dataran tinggi atau gunung.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, dalam siaran pers yang diterima *KR*, kemarin menyebutkan, hingga malam sudah 900 jiwa terdampak banjir bandang di Cisarua diungsikan ke rumah kerabat, masjid dan Wisma PTPN 8 Gunung Mas.

Adapun kerugian materil yang ditimbulkan masih dalam pendataan BPBD Kabupaten Bogor. Banjir susulan hingga sore kemarin masih terjadi. BPBD Kabupaten Bogor melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan lembaga instansi terkait untuk melakukan assesment, evakuasi dan penanganan banjir bandang tersebut.

Hujan dengan intensitas tinggi disertai struktur tanah yang labil juga menyebabkan banjir yang berdampak pada 4 kecamatan di Kota Malang. Adapun kecamatan tersebut adalah Klojen, Sukun, Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang. BPBD Kota Malang melaporkan tinggi mata air antara 20-50 Cm. Satu orang dinyatakan hilang dan 2 KK mengungsi ke kediaman kerabat. Adapun kerugian materil sebanyak 260 rumah terendam dan 2 unit sepeda motor hanyut.

(Ati/Ant)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

ABU VULKANIK MERAPI: Pengendara motor melintas di jalan desa yang tertutup abu vulkanik Gunung Merapi di Songgo Bumi, Mriyan, Tamansari, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (19/1). Terjadinya awan panas guguran Gunung Merapi pada Selasa pukul 02.27 WIB dengan jarak luncur 1.800 meter dan tinggi kolom 500 meter di atas puncak, membuat sebagian wilayah di daerah kaki Gunung Merapi Kabupaten Boyolali dan Klaten terkena hujan abu vulkanik.

9 HARI PELAKSANAAN PTKM Kasus Covid-19, Baru Turun 5 Persen

YOGYA (KR) - Selama 9 hari pelaksanaan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) dilakukan di DIY, Kasus Covid-19 di DIY mengalami penurunan sebesar 5 persen. Kendati mengalami penurunan, namun jumlahnya belum terlalu signifikan dan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu sejumlah upaya guna menekan penambahan kasus dan penegakkan Prokes perlu terus ditingkatkan.

“Memang belum terlalu signifikan, kondisi ini menjadi tantangan bagi kita bersama,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji usai menggelar rapat koordinasi bersama Ketua Gugus Tugas Covid-19, KGPAA Paku Alam X di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Selasa (19/1).

Baskara Aji mengatakan, perkembangan kasus Covid-19 akan terus dipantau sampai menjelang berakhirnya kebijakan PTKM pada Senin (25/1) mendatang. Jadi kebijakan lebih lanjut tentang PTKM masih akan dilihat dari perkembangan yang ada, apakah akan diperpanjang atau tidak. Apabila ditanggal tersebut kasus Covid-19 tidak dapat ditekan maka opsinya adalah perpanjangan masa PTKM atau modifikasi kebijakan di tingkat daerah. Namun pihaknya belum bisa merinci modifikasi kebijakan yang dimaksud. Sebab, hal tersebut baru akan dibahas jika masa PTKM akan segera berakhir.

“Pemda DIY akan melihat perkembangan kasus sampai menjelang Senin (25/1) mendatang. Apakah nanti akan kita stop, modifikasi, atau perpanjangan. Kalau sekarang baru kemungkinan-kemungkinan saja,” jelasnya. **(Ria)-f**

Jemaah Haji Diharapkan Prioritas Vaksinasi

JAKARTA (KR) - Persiapan pelaksanaan ibadah haji 1442 H/2021 M terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Jika diselenggarakan, maka kelompok terbang (kloter) pertama rencananya berangkat 15 Juni 2021.

Sebagai bagian persiapan, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah berkitir surat ke Menteri Kesehatan (Menkes). Surat tanggal 5 Januari 2021 itu tentang permohonan dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

“Dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan, kami telah bersurat ke Menkes, meminta agar jemaah haji tahun 1442 H/2021 M mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Menag, ada sejumlah pertimbangan kenapa calon jemaah haji perlu mendapat prioritas vaksinasi. Pertama, jemaah calon haji tahun 2021 kemungkinan akan ditolak kedatangannya oleh otoritas Arab Saudi apabila belum dilakukan vaksinasi Covid-19. Kedua, jika belum divaksin, perlu alokasi waktu, tempat dan biaya untuk karantina jemaah, sebelum dan setelahnya di Arab Saudi. Ketiga, jika belum divaksin, jemaah harus melakukan

PCR Swab saat karantina, sebelum dan setiba di Arab Saudi.

“Keempat, jika belum divaksin, perlu penerapan *physical distancing* di embarkasi, selama penerbangan dan selama di Arab Saudi serta setibanya jemaah di Tanah Air,” jelasnya.

Menurut Gus Yaqut, jika kuota haji normal, vaksinasi perlu dilakukan kepada sekitar 257.540 orang. Jumlah ini terdiri 221.000 jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus, 4.200 petugas kloter dan petugas non kloter, 3.400 petugas haji di seluruh provinsi dan 18.000 pembimbing haji pada 6.000 KUA Kecamatan di seluruh Indonesia. “Termasuk juga 10.940 panitia dan pembimbing manasik pada 547 Kab/Kota seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia masih menunggu respons Menkes. Pihaknya berharap ini bisa segera dilakukan, utamanya setelah ada kepastian dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan dan kuota haji 1442 H/2021 M.

Sejauh ini Kemenag sudah melakukan koordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk RI serta koordinasi dengan otoritas terkait haji di pemerintah Arab Saudi. Namun hasil pertemuan belum ada kepastian penyelenggaraan haji tahun 2021. **(Ati/Sim)-f**

KPK Imbau, LHKPN Segera Diserahkan

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. Sehubungan hal itu, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.

“Dan LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkp.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/1).

Ia juga menyebutkan, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya, kata Ipi, tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen atas surat kuasa (lampiran 4) atas nama penyelenggara negara, pasangan, dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. **(Ful)-f**